



## Rekonstruksi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Kapasitas Lulusan Universitas Swasta dalam Mendukung Pembangunan Inklusif: Studi Kasus di Provinsi Lampung

Zesty Miranda<sup>1)</sup>, Asmaria<sup>2)</sup>, Neysa Amallia<sup>3)</sup>

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, Indonesia

[zestymirandanunung@gmail.com](mailto:zestymirandanunung@gmail.com)<sup>1)</sup>, [asmariafisip@gmail.com](mailto:asmariafisip@gmail.com)<sup>2)</sup>, [neysaamallia@gmail.com](mailto:neysaamallia@gmail.com)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan universitas swasta serta mengkaji penguatan kapasitas lulusan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan inklusif di Provinsi Lampung. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi pembangunan yang menekankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sosial. Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendukung kebijakan tersebut melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada universitas swasta di Provinsi Lampung serta masyarakat sekitar kampus yang menjadi objek kegiatan pemberdayaan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis, sementara keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa universitas swasta memiliki kontribusi penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan, pengembangan kewirausahaan, serta pendampingan sosial yang melibatkan lulusan perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial. Program pemberdayaan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, penguatan literasi sosial, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan lokal. Penelitian ini juga merekomendasikan rekonstruksi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan peran pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam kerangka pembangunan yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Kebijakan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Swasta, Pembangunan Inklusif

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of community empowerment policies involving private universities and to examine the strengthening of higher education graduates' capacity in supporting inclusive development in Lampung Province. Community empowerment is one of the development strategies that emphasizes improving human resource capacity and community participation in the social development process. Higher education institutions hold a strategic position in supporting this policy through the implementation of the Tri Dharma of Higher Education, particularly in community service activities oriented toward improving the social and economic welfare of local communities. This research uses a qualitative approach with a case study method focusing on private universities in Lampung Province and the communities surrounding the campuses that become the target of empowerment activities. The*



*research data were obtained through in-depth interviews, field observations, and documentation studies related to various community empowerment programs carried out by higher education institutions. Data analysis was conducted using a qualitative analysis model that includes data reduction, data display, and systematic conclusion drawing, while data validity was tested through source triangulation and method triangulation techniques. The results of the study show that private universities make an important contribution to the implementation of community empowerment programs through various training activities, entrepreneurship development, and social assistance involving higher education graduates as agents of social change. These empowerment programs have an impact on increasing community economic activities, strengthening social literacy, and enhancing community participation in various local development activities. This study also recommends reconstructing community empowerment policies that integrate the roles of government, higher education institutions, and society within a more collaborative and sustainable development framework.*

**Keywords:** *Public Policy, Community Empowerment, Private Universities, Inclusive Development*

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan strategis dalam proses pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus aktor utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya secara berkelanjutan. Paradigma pembangunan modern tidak lagi hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga pada upaya memperluas akses, partisipasi, serta kesempatan bagi seluruh kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan secara adil dan setara (LAILATUL, 2024). Perspektif ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari capaian material, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki serta mengembangkan kapasitas sosial yang mampu memperkuat kemandirian kolektif. Chambers menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berorientasi pada proses peningkatan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengakses sumber daya, mengambil keputusan, dan berpartisipasi aktif dalam berbagai proses pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif (ZUBAIDI, 2026).

Perkembangan paradigma pemberdayaan masyarakat juga tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai aktor utama dalam merumuskan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kebijakan pemberdayaan masyarakat menjadi instrumen penting yang menghubungkan kepentingan negara dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga penguatan kapasitas sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara berbagai aktor pembangunan, termasuk lembaga pendidikan tinggi, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil (YUSNITA, 2022). Dunn menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan strategis yang dirancang untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai sumber daya yang tersedia dalam sistem pembangunan (SUBARCAH, 2019).

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kontribusi akademik, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Lembaga pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat (Lamane et al., 2023). Perguruan tinggi memiliki potensi besar dalam membangun kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan berbasis pengetahuan, teknologi, serta inovasi sosial yang relevan dengan



kebutuhan masyarakat lokal. Kehadiran perguruan tinggi dalam ekosistem pembangunan masyarakat memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara dunia akademik dan praktik pembangunan sosial yang berlangsung di lapangan. Keberadaan lulusan perguruan tinggi menjadi salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam menggerakkan proses pemberdayaan masyarakat secara lebih sistematis dan berkelanjutan (Wibowo et al., 2024).

Peran lulusan perguruan tinggi dalam pembangunan masyarakat menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi multidimensional, baik dalam aspek intelektual, sosial, maupun kepemimpinan. Lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang memadai, tetapi juga mampu berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Kapasitas lulusan yang memiliki kemampuan analisis, inovasi, serta kemampuan berkolaborasi dapat menjadi modal sosial yang berharga dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pada perspektif pembangunan berbasis manusia, kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Kehadiran lulusan perguruan tinggi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri, kreatif, serta mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan di tingkat lokal maupun nasional.

Universitas swasta memiliki peran yang cukup besar dalam menghasilkan lulusan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Perguruan tinggi swasta tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan alternatif bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang berperan dalam memperluas akses pendidikan tinggi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah (SUPRON, 2025). Keberadaan universitas swasta di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat melalui berbagai kegiatan akademik dan sosial. Lulusan universitas swasta memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial yang mampu menggerakkan berbagai program pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif dalam menghadapi dinamika pembangunan (ELYZA, 2025).

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah yang memiliki perkembangan pendidikan tinggi swasta yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Keberadaan berbagai universitas swasta di wilayah ini memperlihatkan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi sekaligus membuka peluang bagi pengembangan sumber daya manusia lokal yang lebih berkualitas. Perguruan tinggi swasta di Provinsi Lampung tidak hanya berperan dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di berbagai sektor kehidupan (Lita, 2025). Program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sering kali mencakup pelatihan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, peningkatan literasi pendidikan, serta penguatan kapasitas organisasi masyarakat. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki kontribusi yang cukup penting dalam mendukung pembangunan masyarakat yang lebih inklusif di tingkat lokal. Secara normatif, upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia memiliki landasan kebijakan yang kuat dalam sistem hukum nasional maupun kebijakan daerah. Peran perguruan tinggi sebagai aktor pembangunan sosial ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menempatkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada partisipasi masyarakat juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah (Anwar, 2025).



Kebijakan pemberdayaan masyarakat juga diperkuat melalui berbagai regulasi daerah yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di Provinsi Lampung, arah pembangunan daerah yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019–2024 yang menegaskan pentingnya sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan inklusif. Dengan demikian, keberadaan lulusan universitas swasta tidak hanya dipandang sebagai produk pendidikan semata, tetapi juga sebagai potensi strategis yang dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong proses pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan sosial di tingkat lokal (Sianipar et al., 2025).

Meskipun berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi, implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat praktik. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah keterbatasan integrasi antara kebijakan pemerintah dengan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh perguruan tinggi, termasuk lulusan universitas swasta yang sebenarnya memiliki kapasitas untuk terlibat secara lebih aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program pemberdayaan yang dilaksanakan di berbagai daerah sering kali masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi pembangunan daerah yang lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan kolaboratif agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan (REFINA, 2025).

Kesenjangan antara perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan implementasinya di lapangan juga menjadi persoalan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam kajian kebijakan publik. Banyak kebijakan pemberdayaan masyarakat yang secara konseptual dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kapasitas sosial, namun dalam praktiknya sering kali menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang selama ini diterapkan masih memerlukan evaluasi dan rekonstruksi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang tersedia, termasuk lulusan universitas swasta yang memiliki kompetensi akademik dan sosial yang relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat (Slamet, 2025).

Berdasarkan berbagai dinamika tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji lebih mendalam mengenai penguatan kapasitas lulusan universitas swasta sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan inklusif. Kajian ini tidak hanya memfokuskan pada analisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan perguruan tinggi, tetapi juga menelaah bagaimana peran lulusan universitas swasta dapat dioptimalkan dalam mendukung pembangunan masyarakat yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi berbagai bentuk kontribusi yang dapat dilakukan oleh lulusan perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal (Rahmawati, 2022).

Rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan pada dua fokus utama yang berkaitan dengan dinamika pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan tinggi. Pertama, bagaimana penguatan kapasitas lulusan universitas swasta dalam mendukung pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari implementasi kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kedua, bagaimana model rekonstruksi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kapasitas lulusan universitas swasta sehingga mampu mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan universitas swasta, mengidentifikasi berbagai bentuk penguatan kapasitas lulusan perguruan tinggi, menganalisis dampak program pemberdayaan terhadap



masyarakat sekitar, serta merumuskan model rekonstruksi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya kajian mengenai kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus memberikan manfaat praktis sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan sumber daya manusia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kebijakan pemberdayaan masyarakat serta peran lulusan universitas swasta dalam mendukung pembangunan inklusif di tingkat daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali fenomena sosial secara komprehensif melalui pemahaman terhadap perspektif para aktor yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk menelaah secara lebih mendalam konteks sosial, kebijakan, serta praktik pemberdayaan yang berlangsung di lingkungan perguruan tinggi swasta dan masyarakat sekitar. Fokus penelitian diarahkan pada universitas swasta yang berada di Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian utama, dengan mempertimbangkan peran institusi pendidikan tinggi tersebut dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta program pemberdayaan berbasis penguatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kampus juga menjadi bagian penting dari objek penelitian karena mereka merupakan pihak yang secara langsung menerima manfaat dari berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi (Dewi, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data yang relevan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pengelola program pengabdian masyarakat di perguruan tinggi, lulusan universitas yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, serta masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan. Selain wawancara, observasi lapangan juga dilakukan untuk memahami secara langsung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat serta interaksi antara perguruan tinggi, lulusan, dan masyarakat dalam kegiatan tersebut (Malicia, 2025). Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi berbagai dokumen kebijakan pemerintah, laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, serta berbagai literatur akademik yang relevan dengan kajian pemberdayaan masyarakat dan kebijakan publik. Penggunaan berbagai sumber data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pemberdayaan masyarakat yang melibatkan universitas swasta di Provinsi Lampung (Rosalia, 2021).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis data kualitatif yang meliputi beberapa tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, serta menyederhanakan berbagai informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Tahap selanjutnya adalah penyajian data yang dilakukan melalui pengorganisasian informasi dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar fenomena yang diteliti. Proses analisis diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui interpretasi terhadap berbagai temuan penelitian yang telah dianalisis secara mendalam. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi metode, sehingga informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data dapat dibandingkan dan diverifikasi secara sistematis guna meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Universitas swasta di Provinsi Lampung memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di tingkat regional melalui berbagai kegiatan akademik dan sosial yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat. Keberadaan perguruan tinggi swasta di wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan yang menyediakan layanan pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya. Beragam profil universitas swasta di Provinsi Lampung menunjukkan adanya keragaman program akademik yang mencakup berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu sosial, ekonomi, hingga sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Berbagai universitas swasta juga telah mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penguatan kapasitas ekonomi lokal, peningkatan literasi pendidikan, serta pengembangan potensi kewirausahaan masyarakat. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi swasta memiliki kontribusi yang cukup penting dalam mendukung pembangunan sosial yang berbasis pada penguatan sumber daya manusia lokal.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh universitas swasta di Provinsi Lampung umumnya merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan akademik dalam konteks kehidupan sosial. Program-program tersebut sering kali dirancang dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, penguatan kapasitas organisasi masyarakat, serta kegiatan edukasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Selain melibatkan dosen sebagai pelaksana utama kegiatan pengabdian, berbagai program pemberdayaan juga melibatkan mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi sebagai bagian dari proses pembelajaran yang berbasis pada pengalaman sosial di lapangan. Keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki potensi besar dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan kebutuhan masyarakat. Aktivitas tersebut juga mencerminkan adanya upaya institusional dari perguruan tinggi untuk memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan universitas swasta di Provinsi Lampung menunjukkan adanya hubungan yang cukup erat antara kebijakan pemerintah dan inisiatif perguruan tinggi dalam melaksanakan berbagai program pembangunan sosial. Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan melalui program kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai universitas swasta telah mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan agenda pembangunan daerah, seperti pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan kapasitas pendidikan masyarakat. Program-program tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara lebih efektif ketika terdapat sinergi antara kebijakan pemerintah dengan potensi akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Keberhasilan berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan institusi pendidikan tinggi dalam menyesuaikan kegiatan pengabdian dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Kolaborasi antara universitas swasta dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan sosial di tingkat lokal. Kerja sama tersebut umumnya dilakukan melalui berbagai bentuk kemitraan yang melibatkan dinas pemerintah daerah, lembaga masyarakat, serta organisasi sosial yang memiliki kepentingan dalam pengembangan masyarakat. Pada beberapa kasus yang terjadi pemerintah daerah memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi program, penyediaan sumber daya, serta koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Perguruan tinggi berperan sebagai penyedia sumber daya intelektual serta inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas



program pemberdayaan yang dilaksanakan. Hubungan kemitraan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan masyarakat yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai aktor pembangunan yang mampu bekerja secara kolaboratif dalam mencapai tujuan pembangunan sosial yang lebih luas (Nawawi, 2023).

Secara normatif upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia memiliki landasan kebijakan yang kuat dalam sistem hukum nasional maupun kebijakan daerah. Dalam konteks pendidikan tinggi, peran perguruan tinggi sebagai aktor pembangunan sosial ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menempatkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mengatur bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga mampu berkontribusi dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Di sisi lain, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada partisipasi masyarakat juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat juga diperkuat melalui berbagai regulasi daerah yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di Provinsi Lampung, arah pembangunan daerah yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019–2024 yang menegaskan pentingnya sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan inklusif. Dengan demikian, keberadaan lulusan universitas swasta tidak hanya dipandang sebagai produk pendidikan semata, tetapi juga sebagai potensi strategis yang dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong proses pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan sosial di tingkat lokal (Arfi, 2025).

Penguatan kapasitas lulusan universitas swasta menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung. Lulusan perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial yang mampu menggerakkan berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat melalui penerapan pengetahuan akademik dalam konteks kehidupan sosial. Kapasitas lulusan yang memiliki kemampuan analisis, inovasi, serta keterampilan komunikasi memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pada berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, lulusan sering kali dilibatkan sebagai fasilitator, pendamping masyarakat, maupun penggerak kegiatan kewirausahaan yang berbasis pada potensi lokal. Keterlibatan lulusan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap pembangunan masyarakat.

Berbagai universitas swasta di Provinsi Lampung juga telah mengembangkan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lulusan dalam menghadapi tantangan pembangunan masyarakat yang semakin kompleks. Program pelatihan tersebut biasanya mencakup pengembangan keterampilan kepemimpinan, manajemen organisasi, kewirausahaan sosial, serta kemampuan komunikasi yang diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pelatihan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman praktis bagi lulusan agar mereka mampu mengaplikasikan pengetahuan akademik yang diperoleh selama masa studi dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas. Kegiatan tersebut juga menunjukkan bahwa perguruan tinggi berupaya memperkuat kompetensi lulusan agar mampu berperan secara lebih aktif dalam mendukung pembangunan masyarakat. Penguatan kapasitas lulusan melalui program pelatihan



tersebut menjadi bagian penting dari upaya perguruan tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap dinamika pembangunan sosial (Kristiyanto, 2016).

Selain program pelatihan, penguatan kapasitas lulusan universitas swasta juga dilakukan melalui pengembangan kegiatan kewirausahaan yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Program kewirausahaan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi umumnya melibatkan lulusan sebagai pendamping atau mentor bagi masyarakat yang memiliki minat untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil. Kegiatan tersebut sering kali mencakup pelatihan manajemen usaha, pemasaran produk, serta pengembangan inovasi berbasis potensi lokal yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Pendekatan kewirausahaan sosial yang diterapkan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi dapat berperan sebagai katalisator dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada kreativitas dan inovasi (Sulaeman et al., 2026). Program kewirausahaan tersebut juga memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas lulusan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi juga menjadi salah satu sarana penting dalam memperkuat kapasitas lulusan universitas swasta dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian tersebut memberikan kesempatan bagi lulusan untuk terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, lulusan dapat mengembangkan kemampuan analisis sosial, keterampilan komunikasi, serta kemampuan bekerja sama dengan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat lokal. Pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membentuk karakter lulusan yang memiliki kepedulian sosial serta komitmen terhadap pembangunan masyarakat. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Susanti & Asha, 2025).

Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan lulusan universitas swasta memberikan dampak yang cukup positif terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan kampus. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro yang didukung oleh berbagai program pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha mulai memperoleh pengetahuan baru mengenai manajemen usaha, strategi pemasaran, serta pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Keberhasilan program tersebut juga memperlihatkan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi juga memberikan dampak terhadap peningkatan literasi sosial masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Berbagai kegiatan edukasi yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, serta penguatan kapasitas organisasi masyarakat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pembangunan sosial. Masyarakat yang sebelumnya kurang memiliki akses terhadap informasi dan pengetahuan mengenai berbagai program pembangunan mulai menunjukkan peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial yang diselenggarakan di tingkat lokal. Peningkatan literasi sosial tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas sosial masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Aktivitas tersebut mencerminkan adanya perubahan sosial yang positif sebagai hasil dari pelaksanaan program





pemberdayaan masyarakat yang melibatkan perguruan tinggi.

Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan juga mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh universitas swasta di Provinsi Lampung. Masyarakat mulai menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan lingkungan sosial, penguatan organisasi masyarakat, serta pengelolaan berbagai program pembangunan di tingkat komunitas. Partisipasi tersebut mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pembangunan yang berlangsung di lingkungan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan juga menunjukkan bahwa program pembangunan yang dirancang secara partisipatif memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dapat menciptakan dinamika pembangunan sosial yang lebih inklusif.

Meskipun berbagai program pemberdayaan masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kelemahan dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat yang selama ini diterapkan. Salah satu kelemahan utama berkaitan dengan kurangnya integrasi antara kebijakan pemerintah dengan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan sering kali berjalan secara terpisah dan belum sepenuhnya terkoordinasi dalam kerangka pembangunan daerah yang lebih luas. Selain itu, keterbatasan sumber daya serta kurangnya mekanisme evaluasi yang sistematis juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat masih memerlukan perbaikan dalam aspek perencanaan, koordinasi, serta pengelolaan program agar mampu memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.

Penelitian ini mengusulkan perlunya rekonstruksi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang mampu mengintegrasikan peran pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam kerangka pembangunan yang lebih kolaboratif. Model kebijakan yang direkomendasikan dalam penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas lulusan universitas swasta sebagai salah satu aktor penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Lulusan perguruan tinggi dapat berperan sebagai fasilitator, pendamping masyarakat, maupun penggerak kegiatan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih sinergis antara kebijakan pemerintah dan kontribusi akademik perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Model rekonstruksi kebijakan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial secara inklusif. Integrasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara berbagai aktor pembangunan memungkinkan terciptanya pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat. Perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi dalam bentuk penelitian dan inovasi sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sementara pemerintah berperan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di tingkat lokal. Masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku pembangunan memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan program pemberdayaan yang dilaksanakan. Hubungan sinergis antara ketiga aktor tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.



## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada penguatan kapasitas sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sosial yang lebih inklusif di tingkat daerah. Universitas swasta di Provinsi Lampung memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan akademik dan sosial yang berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Berbagai program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi mencerminkan adanya upaya institusional dalam mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan kebutuhan pembangunan sosial di tingkat lokal. Keterlibatan lulusan universitas swasta dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat juga menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memiliki kontribusi penting dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu berperan sebagai agen perubahan sosial. Aktivitas pemberdayaan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat relevansi peran institusi pendidikan tinggi dalam proses pembangunan masyarakat.

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung memperlihatkan adanya hubungan yang cukup erat antara kebijakan pemerintah dan kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh universitas swasta menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi dapat menciptakan peluang yang lebih luas dalam mengembangkan berbagai inisiatif pembangunan sosial yang berbasis pada potensi lokal. Keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat memberikan kontribusi dalam bentuk penyediaan sumber daya intelektual, inovasi sosial, serta penguatan kapasitas masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan aktivitas akademik perguruan tinggi memperlihatkan bahwa pembangunan masyarakat yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan berbagai aktor pembangunan yang mampu bekerja secara kolaboratif dalam mencapai tujuan pembangunan sosial yang lebih luas.

Penguatan kapasitas lulusan universitas swasta menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan sosial, serta kemampuan inovasi memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Berbagai program pelatihan, kegiatan kewirausahaan, serta aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan lulusan perguruan tinggi memberikan peluang bagi mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan akademik dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas. Keterlibatan lulusan dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat juga memperlihatkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang adaptif terhadap dinamika pembangunan sosial di tingkat lokal.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan universitas swasta memberikan dampak yang cukup positif terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan kampus. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, berkembangnya usaha mikro dan kecil, serta meningkatnya literasi sosial masyarakat merupakan beberapa indikator yang menunjukkan adanya perubahan sosial yang dihasilkan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan juga mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan program pemberdayaan yang dilaksanakan secara partisipatif. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat memiliki potensi besar dalam menciptakan dinamika pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga menegaskan pentingnya rekonstruksi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang mampu mengintegrasikan peran pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam kerangka pembangunan yang lebih kolaboratif. Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang



efektif memerlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis antara berbagai pemangku kepentingan agar berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas lulusan universitas swasta sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang dapat memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan masyarakat di tingkat lokal. Integrasi antara kebijakan pemerintah, inovasi akademik perguruan tinggi, serta partisipasi masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun model pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2025). *Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Perspektif Sosial*. Deepublish.
- Arfi, A. P. S. (2025). Rekonstruksi Peran Pendidikan Formal Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia: Analisis Sistematis Atas Arah, Tantangan, Dan Strategi Penguatan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(11), 5121–5127.
- Dewi, A. H. (2024). *Kapasitas Ketahanan Dan Kekuatan Modal Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Dalam Menghadapi Bencana Covid-19*.
- Elyza, M. W. (2025). *Strategi Pengembangan Life Skill Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Di Smp Negeri 2 Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim*. Uin Raden Intan Lampung.
- Kristiyanto, A. (2016). Rekonstruksi Kebijakan Lingkup Olahraga Pendidikan Untuk Penguatan Daya Saing Masyarakat. *Journal Proceeding*, 1(1).
- Lailatul, U. (2024). *Manajemen Pendidikan Karakter Pada Sekolah Dasar Islam Kurikulum Terpadu (Sdikt) Robbi Rodhiya Di Kota Bandar Lampung*. Uin Raden Intan Lampung.
- Lamane, S. A., Ningsih, W., Ikhsan, N., & Rasidi, H. (2023). *Pembangunan Wilayah Kepulauan*. Tohar Media.
- Lita, E. B. (2025). *Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Transmigrasi Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung)*.
- Malicia, E. (2025). Politik Hukum Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Desentralisasi Yang Akseleratif Terhadap Pembangunan. *Digital Library*.
- Nawawi, M. N. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Penguatan Pendidikan Dan Kewirausahaan*. Selat Media.
- Rahmawati, A. (2022). *Kolaborasi Antar Aktor Dalam Inovasi Desa Sebagai Salah Satu Model Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Komparasi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Di Kabupaten Lampung Selatan)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Refina, A. T. (2025). *Implementasi Program Pembangunan Berkelanjutan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Kota Bandar Lampung*.
- Rosalia, F. (2021). *Tujuan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Ini Adalah Pengenalan Dan Pendampingan Dari Aspek Manajerial (Managerial Skill)*.
- Sianipar, M., Widiana, I. N. W., Latuheru, A., Irawati, D. O., Mardika, N. H., Andra, R. S., Priana, S. E., Handayani, M. A., & Widuri, N. (2025). *Fundamental Ekonomi Pembangunan*. Cv. Gita Lentera.
- Slamet, S. (2025). *Paradigma Baru Dan Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri–Badan Layanan Umum Di Indonesia*.
- Subarkah, A. (2019). *Sistem Pengelolaan Konsep-Konsep Pembiayaan Pendidikan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Mewujudkan Lembaga Pendidikan Yang Mandiri (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Lampung Selatan Dan Pondok Pesantren Daar El-Qolam 3 Tangerang, Banten)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Sulaeman, I., Khadijah, I., & Suherman, U. (2026). Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Era Mbkm: Kajian Integratif Berbasis Kkni. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*,



9(2), 2106–2117.

- Supron, R. (2025). *Kebijakan Pemerintah Daerah Guna Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Lampung*. Uin Raden Intan Lampung.
- Susanti, D., & Asha, L. (2025). Rekonstruksi Teori Dan Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah: Pendekatan Dalam Konteks Pendidikan Islam Kontemporer. *Al-Manar: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 14(1), 535–548.
- Wibowo, H., Nurdin, F., Nurwanti, N., Sekarningrum, B., Firsanti, F., Lesmana, A. C., Nugraha, A. M., & Yunita, D. (2024). *Seri Pendidikan Masyarakat Upaya Membangun Kesadaran Tentang Urgensi Pendidikan Berkelanjutan Di Masyarakat*. Mega Press Nusantara.
- Yusnita, V. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kampung Tangguh Nusantara (Studi Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.
- Zubaidi, H. (2026). *Manajemen Kepala Sekolah Dalam Membangun Sumber Daya Manusia Berkarakter Religius Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda I Dan li Bandar Lampung*. Uin Raden Intan Lampung.